

Kebijakan Pendidikan Islam dalam Konteks Multikulturalisme Indonesia

Sri Devi¹, Juliani², Selpi Trianda Sari³, Zakiah Ulfah⁴

^{1,2,3,4} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email Corresponding Author: srid67320@gmail.com.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang beragam membutuhkan pendidikan yang mampu menumbuhkan toleransi dan inklusivitas di tengah keragaman agama, budaya, dan etnis. Penelitian ini bertujuan mempelajari dan memahami kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikulturalisme Indonesia, khususnya sejauh mana kebijakan tersebut menerima nilai-nilai keberagaman, mendorong sikap toleran, dan membentuk siswa yang religius, moderat, dan inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kepustakaan, mengumpulkan dan menganalisis data dari artikel jurnal dan referensi terkait melalui teknik analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam telah mulai diintegrasikan dengan nilai-nilai multikultural melalui kurikulum yang inklusif dan pendekatan pembelajaran dialogis, dengan lembaga seperti madrasah dan pesantren memiliki potensi besar sebagai agen moderasi beragama. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan seperti dominasi pendekatan normatif, keterbatasan pemahaman pendidik tentang multikulturalisme, dan kurangnya dukungan kebijakan operasional. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan Islam multikultural perlu diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, dan masyarakat agar dapat melahirkan generasi yang religius dan mampu hidup rukun di tengah keberagaman.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Multikulturalisme, Pendidikan Islam.

ABSTRACT

Indonesia as a diverse country requires education that can foster tolerance and inclusivity amid the diversity of religions, cultures, and ethnicities. This study aims to examine and understand Islamic education policies in the context of Indonesian multiculturalism, particularly the extent to which these policies embrace diversity values, promote tolerant attitudes, and develop students who are religious, moderate, and inclusive. The research uses a descriptive qualitative approach with library research methods, collecting and analyzing data from journal articles and related references through content analysis techniques. The study results indicate that Islamic education policies have begun to be integrated with multicultural values through inclusive curricula and dialogical learning approaches, with institutions such as madrasahs and pesantrens having great potential as agents of religious

moderation. However, implementation still faces challenges such as the dominance of normative approaches, limited understanding of multiculturalism among educators, and insufficient support for operational policies. In conclusion, multicultural Islamic education policies need to be strengthened through synergy between the government, educational institutions, educators, and society to produce a generation that is religious and able to live in harmony amid diversity.

Keywords: Educational Policy, Multiculturalism, Islamic Education.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang beragam. Keanekaragaman masyarakat Indonesia mencakup keanekaragaman agama, budaya, dan etnis. Ini merupakan *sunnatullah*, dan keberadaannya tidak dapat dibantah lagi bagi setiap bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penduduk yang berasal dari berbagai tempat yang kemudian menuntut hak yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan bahkan sistem pemerintahan (Halim, 2021).

Semangat untuk saling memahami adalah hal yang paling penting untuk dibangun dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Untuk menjamin kehidupan yang harmonis dan toleran, masyarakat harus memiliki perspektif ini. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengembangkan pemahaman multikulturalisme dalam jangka panjang adalah melalui bidang pendidikan. Multikulturalisme dalam pendidikan dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri, merasa bebas, dan memiliki perilaku budaya yang umum. Dengan demikian, siswa dapat memahami setiap teman yang ada di lingkungannya, sehingga literasi keberagaman dapat diterima dengan cepat (Turhan et al., 2020).

Pendidikan multikultural dirancang untuk mengembangkan semua potensi siswa, tanpa membedakan agama mereka. Diharapkan pendidikan multikultural ini mengajarkan toleransi antar umat beragama kepada siswa. Masyarakat dan lingkungan sekolah, orang tua siswa, dan instansi terkait juga memiliki peran besar dalam mewujudkan toleransi ini. hingga dapat melahirkan generasi baru yang terbuka menghadapi perbedaan. (Hendra, 2022). Solusi atas realitas budaya yang berbeda adalah keterkaitan antara pendidikan dan multikulturalisme. Ini adalah proses pengembangan semua potensi dengan mempertimbangkan pluralitas dan heterogenitas yang merupakan konsekuensi dari keragaman budaya, etnis, dan agama (Hendra, 2022).

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus digunakan untuk menanamkan rasa toleran, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan untuk hidup bermasyarakat dengan damai. Menurut penulis, memasukkan nilai-nilai multikultural ke dalam kebijakan dan kurikulum PAI (Pendidikan Agama Islam) dapat membantu sekolah dan madrasah membuat warga yang inklusif dan pluralistik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan pendidikan Islam harus digunakan

selain untuk memberikan pengetahuan agama. Itu juga harus mengajarkan siswa toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan hidup bermasyarakat dengan damai.

Untuk mempertahankan identitas keislaman sambil menerima perbedaan budaya, pendidikan Islam menghadapi tantangan di era globalisasi. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa sekolah Islam yang menerapkan multikulturalisme memiliki kemampuan untuk mengurangi prasangka antar kelompok dan memperkuat karakter siswa yang ramah dan terbuka. Penguatan karakter ini membentuk individu yang inklusif dan memperluas wawasan kebangsaan melalui pemahaman sejarah dan kebudayaan lokal yang beragam (Manajemen & Vol, 2025).

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikulturalisme Indonesia, khususnya dengan mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat menerima nilai-nilai keberagaman, mendorong sikap toleransi, dan membentuk siswa yang religius, moderat, dan inklusif dalam kehidupan sosial dan nasional mereka.

METODE

Penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan adalah jenis penelitian di mana penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah semua upaya peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan subjek atau masalah yang akan diteliti (Assingily, 2021). Informasi ini dapat diperoleh dari sumber-sumber data yang ada atau dari sumber-sumber lain (Agama et al., 2025).

Sumber utama penelitian ini mencakup artikel jurnal erta beberapa refrensi tambahan untuk memperdalam pembahasan mengenai kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikulturalisme Indonesia. Data dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis isi literatur yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan seleksi informasi yang relevan dengan fokus kajian, yaitu kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikulturalisme Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui teknik analisis isi (content analysis). Langkah-langkah analisis meliputi pemilahan informasi penting, pengelompokan data berdasarkan tema yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikulturalisme Indonesia.

Dengan demikian, metode ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikulturalisme Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam menggunakan pendekatan lapangan agar hasilnya semakin akurat dan aplikatif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh

pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikulturalisme Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan rangkaian keputusan strategis yang dirumuskan untuk mengatur, mengembangkan, dan mengarahkan sistem pendidikan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam literatur, kebijakan pendidikan dipandang sebagai instrumen penting untuk menata sistem pendidikan secara efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat modern (Muid et al., 2025). Kebijakan ini tidak hanya mencakup peraturan formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip filosofis, hukum, dan sosial yang mendasari praktik pendidikan (Muid et al., 2025). Dengan demikian, teori kebijakan pendidikan menempatkan kebijakan sebagai pedoman normatif dan operasional dalam membentuk arah sistem pendidikan.

Kebijakan pendidikan di era sekarang tidak hanya diarahkan pada struktur formal pendidikan, tetapi juga pada transformasi kualitas pembelajaran dan kapasitas sumber daya manusia. Misalnya, penelitian tentang kebijakan pendidikan yang terkait dengan pemberdayaan guru dan inovasi pembelajaran menjelaskan bahwa program-program seperti Guru Penggerak dirancang untuk memfasilitasi perubahan pedagogis yang lebih berpihak pada peran guru sebagai agen perubahan dalam proses pendidikan (Nurwanci et al., 2025). Menurut penulis, Transformasi ini mencerminkan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif harus responsif terhadap tantangan zaman serta mampu mengintegrasikan inovasi pedagogi dan praktik profesional yang mendukung pembelajaran bermutu.

Berdasarkan kajian teori di atas, jelas bahwa kebijakan pendidikan lebih dari sekadar dokumen tertulis. Ia adalah kerangka hidup yang menentukan bagaimana pendidikan dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan yang baik harus dilandasi teori yang kuat, responsif pada dinamika sosial, dan berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup peserta didik.

Kebijakan Pendidikan Islam

Dalam kajian proses kebijakan, penetapan arah pendidikan Islam melibatkan banyak aktor (pemerintah pusat dan daerah, lembaga keagamaan, madrasah/pondok, dan masyarakat), serta rentetan tahap kebijakan formulasi, implementasi, dan evaluasi yang kerap dipengaruhi oleh dinamika politik, kapasitas pengelola, dan keterbatasan sumber daya. Akibatnya, ada kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik lapangan: misalnya regulasi yang progresif seringkali tersendat pada aspek teknis pelaksanaan, pelatihan pendidik, dan penganggaran di tingkat daerah sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai (Literasiologi, 2021).

Secara konkret, teori yang menyebut pentingnya pengakuan dan legitimasi pendidikan Islam diwujudkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kedua kebijakan ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam mengatur, melindungi, dan mengembangkan pendidikan Islam, baik dari sisi kelembagaan, kurikulum, pendanaan, maupun peran sosialnya. Ini sejalan dengan teori kebijakan pendidikan Islam yang menekankan peran negara dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas pendidikan berbasis nilai keagamaan (Mustarsyidah, 2021). Selain itu, kajian teori yang menekankan pentingnya kebijakan adaptif dan kontekstual juga tercermin dalam kebijakan pemerintah seperti Kurikulum Merdeka di madrasah, kebijakan moderasi beragama, serta peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan Islam dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa kebijakan pendidikan Islam akan berjalan dengan baik jika disusun bersama berbagai pihak, dilaksanakan oleh pelaksana yang memiliki kemampuan yang memadai, serta dievaluasi secara rutin. Dengan cara tersebut, kebijakan pendidikan Islam dapat menyesuaikan antara kebijakan nasional dan nilai-nilai lokal, sehingga mampu membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu hidup rukun dalam masyarakat yang beragam.

Multikulturalisme

Menurut Ana Irhandayaningsih, multikulturalisme asalnya dari kata multi (jamak) dan kultural (mengenai budaya). Multikulturalisme mengimplikasikan pembenaran terhadap aktualitas dari heterogenitas kultural yang cakupannya yaitu keragaman konservatif, contohnya beragamnya suku, ras, agama, termasuk bervariasinya bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang muncul secara kontinu dalam fase sejarah kehidupan masyarakat (Pembentukan et al., 2020).

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mengapresiasi setiap budaya yang membentuk negara ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Indonesia tidak dapat dipisahkan dari budayanya sendiri. Pemerintah juga memiliki peran yang besar dalam mengapresiasi budaya Indonesia, dalam berbagai cara, seperti dengan membiarkan orang-orang menikmati budaya mereka sendiri (Manfour, 2022).

Paradigma pendidikan multikultural, diperlukan untuk menghadapi pluralisme budaya dalam kehidupan nyata. Tujuannya adalah untuk mendidik siswa untuk berperilaku dan bersikap toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang terdiri dari berbagai budaya, suku, ras, suku, dan agama. Paradigma ini dimaksudkan untuk mengajarkan siswa bahwa budaya orang lain, perbedaan, dan keberagaman adalah kekuatan, kekayaan, dan khazanah bangsa.

Menurut perspektif ini, sikap eksklusif yang ada dalam otak siswa dan kemampuan untuk membenarkan pendapatnya (klaim kebenaran) dengan mengkritik perspektif dan pilihan orang lain dapat dikurangi atau dihilangkan (Fitrikasari & Andiana, 2023).

Pendidikan multikultural adalah gagasan dan gerakan untuk reformasi pendidikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa laki-laki dan perempuan, siswa berkebutuhan khusus, siswa dari kelompok etnis dan budaya yang berbeda, memiliki peluang yang sama untuk berprestasi di sekolah dan menguatkan karakter para siswa dalam memahami keberagaman (Amini et al., 2024).

Menurut penulis, Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik agar mampu menerima, menghargai, dan hidup berdampingan dengan perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hidup yang ada di masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan keberagaman sebagai pengetahuan, tetapi membentuk sikap toleran, adil, dan empatik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik tidak mudah bersikap diskriminatif atau merasa paling benar sendiri.

Lebih lanjut, menurut penulis Pendidikan Islam multikultural adalah proses pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dengan tetap menghargai realitas keberagaman suku, budaya, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam berperan membentuk pribadi muslim yang beriman, berakhlak, dan mampu hidup damai di tengah perbedaan.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikultural di Indonesia

Implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikultural di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan agama memiliki peran strategis dalam merespons realitas sosial yang beragam. Berdasarkan kajian literatur, kebijakan pendidikan Islam tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen penguatan keimanan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap sosial yang inklusif dan toleran. Pendidikan Islam diarahkan untuk membantu peserta didik memahami ajaran agama secara mendalam sekaligus mampu menghargai perbedaan budaya, suku, dan latar belakang sosial yang hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tampak melalui integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum dan praktik pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pendekatan pembelajaran yang menekankan dialog, keterbukaan, serta penghormatan terhadap perbedaan menjadi bagian penting dalam proses internalisasi nilai. Penelitian Firdaus (2024) menjelaskan bahwa pendidikan Islam yang mengadopsi perspektif multikultural

mampu menumbuhkan kesadaran sosial peserta didik, khususnya dalam membangun sikap toleran dan menolak pandangan keagamaan yang eksklusif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam memperkuat harmoni sosial apabila diterapkan secara kontekstual dan berkelanjutan (Firdaus, 2024).

Namun demikian, kajian pustaka juga menemukan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam berwawasan multikultural masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan pembelajaran yang masih berorientasi pada penyampaian materi normatif, sehingga ruang dialog dan refleksi kritis peserta didik terhadap realitas keberagaman belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, keterbatasan pemahaman pendidik mengenai konsep pendidikan multikultural turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Ghozali, Imawan, dan Zamzami (2024) menegaskan bahwa tanpa penguatan kompetensi pendidik dan budaya sekolah yang inklusif, nilai-nilai multikultural sulit terinternalisasi secara mendalam dalam diri peserta didik (Ghozali et al., 2024).

Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, memiliki modal sosial yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam multikultural. Nilai-nilai keislaman yang menekankan keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama dapat menjadi landasan etis dalam membangun praktik pendidikan yang ramah terhadap keberagaman. Ketika kebijakan pendidikan Islam didukung oleh keteladanan pendidik dan budaya institusi yang terbuka, pendidikan Islam berpotensi menjadi agen penting dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam konteks multikultural merupakan kebutuhan nyata bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa di Indonesia. Kebijakan yang ada perlu terus diterjemahkan ke dalam praktik pendidikan yang lebih dialogis, humanis, dan kontekstual. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan peserta didik yang religius secara personal, tetapi juga mampu menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, hidup rukun, dan berkontribusi positif dalam masyarakat yang beragam.

Upaya Penguatan Kebijakan Pendidikan Islam Berbasis Multikulturalisme

Pendidikan Islam tidak lagi cukup diposisikan sebagai sarana pembentukan kesalehan individual, tetapi juga harus mampu membentuk sikap sosial yang terbuka, adil, dan menghargai perbedaan. Dalam konteks kebijakan, pendidikan Islam dituntut untuk menghadirkan pendekatan yang mampu mengintegrasikan nilai keislaman dengan prinsip hidup berdampingan secara damai di tengah keragaman budaya, suku, dan agama.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa salah satu bentuk penguatan kebijakan pendidikan Islam berbasis multikulturalisme dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang inklusif. Kurikulum Pendidikan Agama Islam perlu dirancang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga pada penginternalisasian nilai toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Penelitian yang membahas strategi kurikulum berbasis multikultural menegaskan bahwa pembelajaran yang mengaitkan nilai agama dengan realitas sosial peserta didik dapat membantu menumbuhkan kesadaran multikultural secara lebih kontekstual dan bermakna. Pendekatan ini mendorong siswa untuk memahami agama sebagai pedoman etis dalam kehidupan sosial, bukan sebagai alat pembatas dalam pergaulan masyarakat yang beragama (Jukim, 2024).

Pengembangan pendidikan multikultural dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak perlu dipisahkan sebagai mata pelajaran baru, melainkan harus diberi perhatian lebih dalam materi yang ada. Penekanan terhadap nilai-nilai multikultural dapat diterapkan secara mendalam dalam konten pelajaran maupun dalam pengalaman belajar siswa, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih berarti dan relevan. Berkaitan Dalam kerangka pendidikan agama Islam yang mengadopsi perspektif multikultural, Achmaduddin, sebagaimana dikutip oleh Agus dan Islamil, menyatakan bahwa materi PAI bertujuan untuk mengadaptasi dan mengembangkan nilai-nilai kemajemukan yang sudah ada dalam kurikulum pendidikan agama.

Selain penguatan kurikulum, kebijakan pendidikan Islam berbasis multikulturalisme juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas pendidik. Guru dan tenaga pendidik memegang peran sentral dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Literasi multikultural, kemampuan pedagogik yang dialogis, serta keteladanan sikap inklusif menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebuah kajian tentang kebijakan dan manajemen lembaga pendidikan Islam menunjukkan bahwa budaya sekolah yang menghargai keberagaman, ditopang oleh kepemimpinan yang inklusif, mampu memperkuat internalisasi nilai multikultural pada peserta didik secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, kajian pustaka juga mengungkap bahwa penguatan kebijakan pendidikan Islam berbasis multikulturalisme masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan pola pembelajaran yang selama ini bersifat normatif, keterbatasan pelatihan guru, serta belum optimalnya dukungan kebijakan operasional di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar kebijakan yang dirumuskan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar hidup dalam praktik pendidikan.

Menurut penulis, penguatan kebijakan pendidikan Islam berbasis multikulturalisme merupakan kebutuhan mendesak bagi masa depan bangsa Indonesia. Pendidikan Islam yang dikelola secara inklusif dan kontekstual akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, sikap toleran, dan kemampuan hidup rukun dalam keberagaman. Dengan komitmen kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten, pendidikan Islam dapat menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan berkeadaban.

Multikulturalisme dan Tantangannya dalam Pendidikan Islam di Indonesia

Multikulturalisme dalam pendidikan Islam di Indonesia merupakan respons terhadap kenyataan bahwa negara ini terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Konsep pendidikan Islam yang multikultural bertujuan menanamkan kemampuan peserta didik untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman tersebut. Pendidikan Islam yang berbasis nilai multikultural tidak hanya mengajarkan ajaran agama secara tekstual, tetapi juga mendorong pengembangan karakter sosial yang menghargai pluralitas masyarakat yang kompleks seperti Indonesia.

Dalam praktik pendidikan Islam, terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penyampaian nilai-nilai multikultural kepada peserta didik. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi terhadap nilai multikultural itu sendiri, yang kadang masih dipengaruhi oleh pemahaman agama yang normatif dan kurang terbuka terhadap keragaman konteks sosial. Selain itu, pendidikan Islam seringkali berhadapan dengan model pembelajaran yang masih tradisional, sehingga belum semua pendidik mampu menerapkan strategi pengajaran yang mengintegrasikan toleransi dan pemahaman antarbudaya secara sistematis dalam kelas. Persoalan kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh juga menjadi hambatan, karena masih terdapat kekurangan sumber daya, pelatihan pendidik, serta materi ajar yang benar-benar merepresentasikan nilai multikultural dalam Pembelajaran Agama Islam (Firdaus, 2024).

Contoh lain tantangan muncul di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam tradisional. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengembangkan model pendidikan multikultural yang tidak hanya berlandaskan nilai keagamaan, tetapi juga responsif terhadap perbedaan sosial dan budaya di sekitarnya. Perubahan sosial yang cepat dan kompleks membuat pesantren dituntut untuk memperluas cara pandang pendidik dan santri agar mampu memahami dinamika masyarakat plural tanpa meninggalkan identitas keislaman mereka (Faoziah & Hum, 2016).

Selain itu, tantangan teknis seperti kurangnya dukungan kurikulum yang fleksibel dan program pelatihan multikultural untuk guru atau ustadz/ustadzah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pengembangan pendidikan Islam di

Indonesia. Upaya mengatasi tantangan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan menghargai semua identitas budaya. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berkontribusi secara optimal dalam membentuk generasi yang toleran dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural.

Menurut penulis, multikulturalisme merupakan dimensi penting dalam pendidikan Islam Indonesia yang perlu terus dikembangkan secara sadar dalam kebijakan dan praktik pembelajaran. Tantangan yang muncul bukanlah halangan permanen, tetapi merupakan panggilan untuk memperkuat kerangka pendidikan yang lebih inklusif, reflektif, dan adaptif terhadap realitas sosial bangsa. Dengan memperkuat pemahaman serta strategi pengajaran yang menghargai perbedaan, pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam membentuk peserta didik yang religius secara pribadi, tetapi juga mampu membentuk insan yang toleran, berkarakter, dan siap menghadapi kehidupan dalam masyarakat majemuk secara damai.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, dalam konteks multikulturalisme Indonesia, penulis berpendapat kebijakan pendidikan Islam memiliki kemampuan untuk menangani realitas sosial yang beragam secara strategis. Pendidikan Islam tidak hanya membantu meningkatkan iman dan pemahaman keagamaan tetapi juga membantu membangun sikap sosial yang moderat, toleran, dan inklusif. Untuk menanamkan kesadaran akan keberagaman sebagai sunnatullah yang harus dihargai dan dikelola secara bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, adalah penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam kebijakan dan kurikulum pendidikan agama Islam.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum baru, pendekatan pembelajaran dialogis, dan penanaman nilai keadilan dan persaudaraan telah digunakan untuk menerapkan kebijakan pendidikan Islam berbasis multikulturalisme. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada banyak masalah. Beberapa di antaranya adalah pendekatan normatif yang dominan, pemahaman siswa tentang multikulturalisme yang terbatas, dan kurangnya dukungan kebijakan operasional di tingkat satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga oleh budaya institusi, kemampuan sumber daya manusia, dan komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan pendidikan.

Oleh karena itu, demi masa depan bangsa dan negara Indonesia, kebijakan pendidikan Islam yang multikultural harus diperkuat. Agar nilai-nilai multikultural dapat terinternalisasi secara berkelanjutan dalam praktik pendidikan, pemerintah, lembaga pendidikan Islam, pendidik, dan masyarakat harus terus

membangun sinergi. Pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya religius secara pribadi, tetapi juga kesadaran sosial, toleransi, dan kemampuan hidup rukun dan berkeadaban di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dengan kebijakan yang inklusif dan pelaksanaan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, S. J., & Wati, S. (2025). *Urgensi Pendidikan Islam Multikulturalisme*. 1(3).
- Amini, S. A., Mulia, J. R., Trisoni, R., & Hutaginjang, Y. A. (2024). *Jurnal Dirosah Islamiyah* *Jurnal Dirosah Islamiyah*. 6, 130–142. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i1.1355>
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Faoziah, N., & Hum, M. (2016). *Peran dan Tantangan Pengembangan Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Pesantren Sunan Pandanaran*. 1(2), 197–226.
- Firdaus, W. A. (2024). *Tantangan dan Peluang Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*. 2(2), 116–125.
- Fitrikasari, M., & Andiana, D. (2023). *Pentingnya Multikultural dalam Lembaga Pendidikan*. 5(2), 35–42.
- Ghozali, I., Imawan, M. R., & Zamzami, M. R. (2024). *Multiculturalism Education in Islam*. 2(1), 103–112.
- Halim, A. (2021). *Pendidikan Islam Multikultural dalam Prespektif Azyumardi Azra*.
- Hendra, R. (2022). *Pendidikan Multikultural Wujud Toleransi di SMP Fidelis Payakumbuh*. 1319–1334. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2405>
- Jukim, J. (2024). *Kurikulum Dan Strategi Pendidikan Agama Islam Berbasisi Multikultural* : 3(3), 63–69.
- Literasiologi, J. (2021). *JURNAL LITERASIOLOGI Rasyidi, dkk*. 6(2), 75–88.
- Manajemen, J. I., & Vol, S. P. (2025). *Online Journal System* : 5(2), 350–365.
- Manfour, K. (2022). *Konsep Liberalisme Will Kymlicka dalam Masyarakat Multikultural dan Relevansinya*. 2, 89–98. <https://doi.org/10.21460/aradha.2022.22.786>
- Muid, A., Halizah, R. N., & Waro, K. (2025). *Konsep dasar kebijakan pendidikan*. 15, 65–73. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>. *Jurnal*
- Mustarsyidah, Z. R. (2021). *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. 2(2), 167–180.
- Nurwanci, S., Rafiki, R., & Halimah, L. (2025). *Kebijakan Pendidikan dalam Konteks Meningkatkan Pembelajaran melalui Guru Penggerak*. 10(2), 1087–1093.
- Pembentukan, D., Berkarakter, M., Y, P. P. A., Priyansyah, R., Mashuri, M. A., & Kebijakan, P. (2020). *No Title*.
- Turhan, M., Suyanto, T., Ajib, A., & Fitroh, N. (2020). *Islam dan Multikulturalisme : Urgensi , Transformasi , dan Implementasi dalam Pendidikan Formal*. 8(1), 59–74.